

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi

3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

III.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.00%	71.61%	99.46%	BPS Sakernas
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.30%	93.55%	100.27%	BPS Sakernas
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.50%	97.53%	100.3%	Disnaker

III.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70.00%	70.12%	100.17%	72.00%	71.61%	99.46%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKE)	92.56%	93.18%	100.67%	93.30%	93.55%	100.27%
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perseksihan Hubungan Industrial	94.46%	97.33%	103.04%	97.50%	97.53%	100.3%

III.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Akhir 2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGAKT KEMAJUAN
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.61%	78.00%	91.81%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.55%	92.86%	100.74%
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.53%	96.09%	101.50%

III.5 Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	PROVINSI	NASIONAL
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.61%	73.45%	70.63%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.55%	95.81%	95.09%
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.53%	-	57.19%

III.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan:

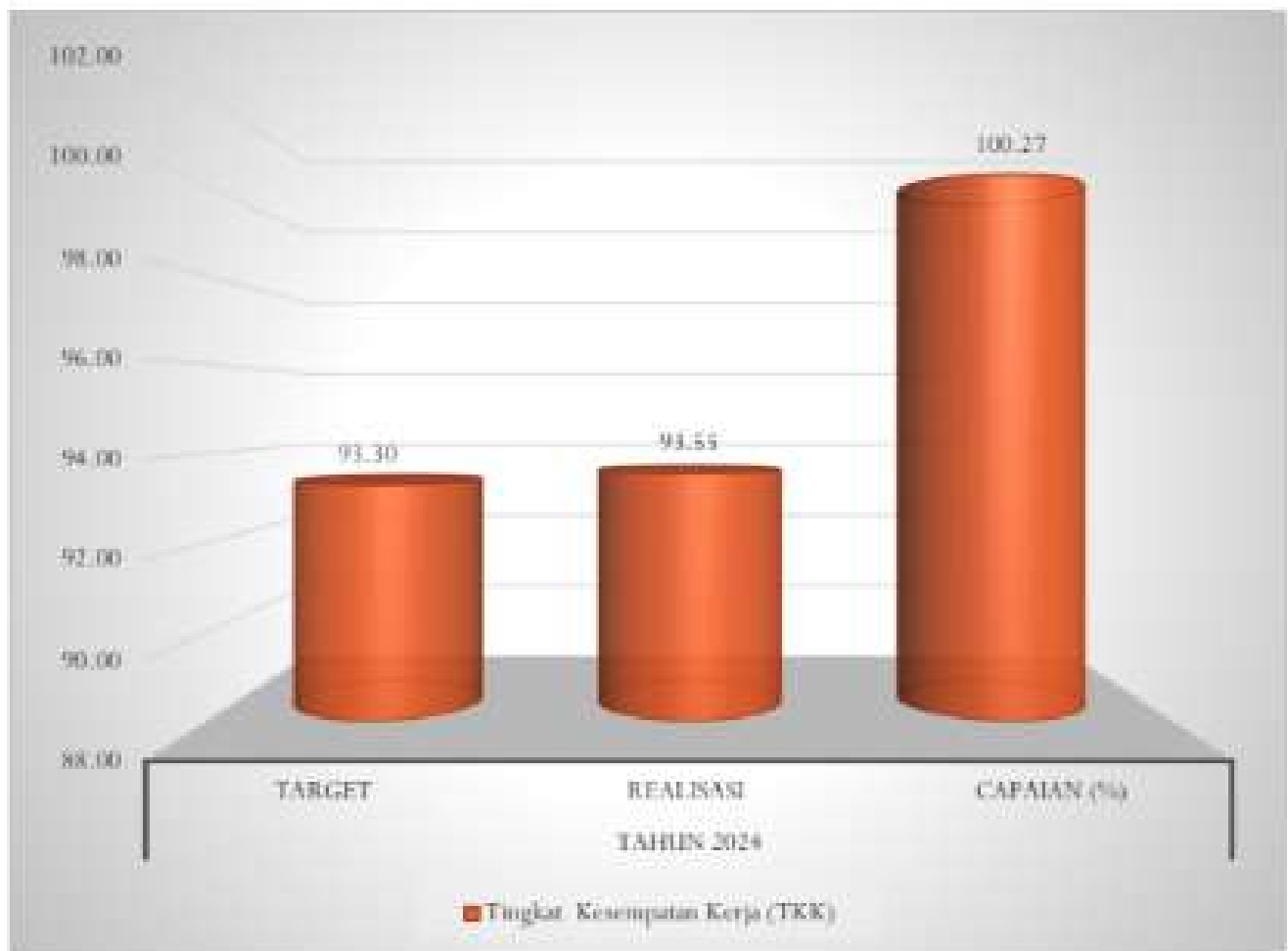
Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Solusi Alternatif

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.00%	71.61%	99.46%		
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.30%	93.55%	100.27%	Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan	
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.50%	97.53%	100.3%	➢ Penambahan jumlah SDM Mediator Hubungan Industrial ➢ Peningkatan kapasitas SDM Mediator Hubungan Industrial	Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisasi mediator hubungan industrial.

Gambar 3.1.

Capaian Kinerja Sasaran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)



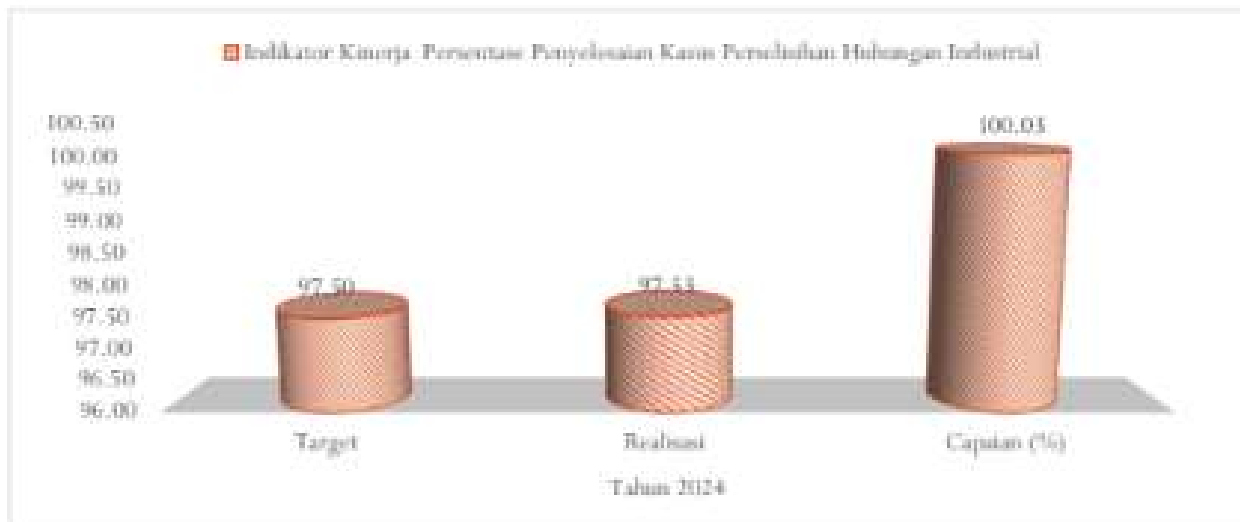
Tahun 2024 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 715.615 orang dibanding tahun 2023 yang berjumlah 688.645 orang dan jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebesar 739.013 orang dibanding tahun 2024 yang berjumlah 764.970 orang.

Untuk penyelenggaraan penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada tahun 2024 dari 7.494 pencari kerja telah ditempatkan sebanyak 1.013 orang.

Jika dilihat dari tabel capaian indikator kinerja Tingkat Kesempatan Kerja pada Tahun 2024 dengan target 93,30% terealisasi sebesar 93,55% dan capaian 100.27%.

Gambar 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial



Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan 97,53% dari target 97,50% yang ditetapkan pada tahun 2024. Sebanyak 79 kasus hubungan industrial dapat diselesaikan dari 81 kasus yang masuk terdaftar.

Ada beberapa indikasi sebab kenaikan capaian indikator tersebut antara lain: Pihak-pihak yang berselisih bersedia untuk panggilan mediasi sehingga mempercepat proses waktu penyelesaian hubungan industrial, adanya iktikad baik untuk mediasi tanpa berbelit-belit antara pengusaha dan pekerja dalam mengambil solusi jalan tengah dan legawa atas solusi dari hasil keputusan yang telah disepakati.

Gambar 3.3.

Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial



III.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.61%				
	1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.55%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	2 jenis	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	3 dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	12 bulan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60 laporan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 dokumen	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	366 laporan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 laporan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik	70%	
				Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	3	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	15 buku	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	5.55%	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS	392 orang	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	392 orang	

			Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	52 perusahaan	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	52 perusahaan	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	10.53%	
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlayani pelayanan antar kerja	437 orang	
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	376 orang	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	61 orang	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	65 buku	
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	7.494 orang	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	172 orang	

				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	172 orang	
	2. Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.53%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	27.89%	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, pembinaan Struktur dan Skala Upah dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	465 orang	
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 laporan	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial	81 kasus	
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	81 perkara	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan	79 perkara	

				Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
--	--	--	--	---	---	--	--

III.8 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran strategis, 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD 2024		
	Target	Realisasi	%Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11,540,775,900	10,649,453,736	92.28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,103,820,500	6,850,276,401	96.43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,755,000	17,094,100	69.05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,950,000	12,193,700	64.35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,805,000	4,900,400	84.42
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,840,006,000	4,711,184,577	97.34

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,832,006,000	4,703,196,377	97.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,000,000	7,988,200	99.85
Administrasi Umum Perangkat Daerah	965,231,327	898,167,747	93.05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,051,000	16,025,500	99.84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700,144,587	645,775,450	92.23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93,685,000	91,454,528	97.62
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,508,540	32,717,300	84.96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,500,000	3,540,000	47.20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,342,200	97,922,469	99.57
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	11,000,000	10,732,500	97.57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808,428,173	772,798,584	95.59
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	2,627,600	52.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172,314,173	162,659,924	94.40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631,114,000	607,511,060	96.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465,400,000	451,031,393	96.91

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143,000,000	133,193,094	93.14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,050,000	39,434,250	98.46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,050,000	278,404,049	695.14
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	79,438,800	54,695,794	68.85
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	79,438,000	54,695,794	68.85
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	79,438,000	54,695,794	68.85
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,800,000,100	2,468,293,277	88.15
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2,730,000,000	2,442,539,377	89.47
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2,730,000,000	2,442,539,377	89.47
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	70,000,100	25,753,900	36.79
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	70,000,100	25,753,900	36.79
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	757,516,500	582,938,685	76.95
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	408,355,125	286,549,410	70.17
Pelayanan antar Kerja	312,550,005	241,452,960	77.25

Perluasan Kesempatan Kerja	95,805,120	45,096,450	47.07
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	135,956,375	131,752,175	96.91
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	135,956,375	131,752,175	96.91
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	213,205,000	164,637,100	77.22
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	213,205,000	164,637,100	77.22
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	800,000,000	693,249,579	86.66
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	329,673,570	281,298,389	85.33
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	329,673,570	281,298,389	85.33
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	470,326,430	411,951,190	87.59
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	411,417,000	357,885,490	86.99

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58,909,430	54,065,700	91.78
--	------------	------------	-------

Tabel 3.8.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	TUJUAN: Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72.00%	71.61%	99.46%	11,540,775,900	10,649,453,736	92.28	7.72
1.1	SASARAN: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.30%	93.55%	100.27%	10,740,775,900	9,956,204,157	92.70	7.30
1.2	SASARAN: Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.50%	97.53%	100.3%	800,000,000	693,249,579	86.66	13.34